Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta

PENGHANTARAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan
Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012 - 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIDATO PENGHANTARAN :
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR MASA JABATAN (AMJ)
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2012-2017

Yogyakarta, 13 Juli 2017

---

1. Yth. Pimpinan DPRD DIY;
2. Yth. Segenap Anggota DPRD DIY; dan
3. Hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, nikmat, barokah, dan hidayah-Nya; kepada kita semua. Sehingga dapat dipertemukan pada forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam keadaan sehat wal'afiat, guna mengikuti Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah tahun 2012-2017.

Hari ini begitu istimewa, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama, periode pembangunan jangka menengah tahun 2012-2017 akan segera berakhir. Seiring dengan hal itu, saya selaku Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan kepada DPRD, sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LKPJ AMJ ini disusun dengan mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Disamping sebagai pelaksanaan mandat dari undang-undang, LKPJ ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan dalam kurun waktu lima tahun, yang merupakan rekapitulasi dari capaian pembangunan daerah selama kurun waktu tersebut, dengan dilandasi semangat Jogja Gumregah. Semangat Renaisans Yogyakarta merupakan cara berpikir dan bertindak revolusioner terhadap konsep pembangunan komprehensif berbasis spasial berkelanjutan, yang terus dilakukan pada masa kini hingga masa mendatang, tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas kinerja untuk memenuhi harapan masyarakat dan tuntutan perubahan.

Untuk mengawali penyampaian Penghantaran LKPJ AMJ ini, ijinkan saya mengajak membuka kembali visi pembangunan jangka menengah, yakni : "Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter, berbudaya, maju, mandiri, dan sejahtera menyongsong Peradaban Baru". Aktualisasi untuk mewujudkan hal tersebut melalui konsep pembangunan, dengan garis besar misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif, dan kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
4. Memantabkan sarana prasarana daerah.

Adapun untuk mengukur efektivitas capaiannya, maka ditentukan sejumlah sasaran indikator yang secara ringkas dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Utama merupakan sasaran pembangunan daerah yang dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif, sebagai pijakan untuk memahami langkah-langkah yang sudah dicapai dan menentukan strategi terhadap permasalahan yang fokus terhadap sasaran yang akan dicapai. Penjelasan ringkas, terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dari total 17 indikator yang sudah ditetapkan, sebagian besar atau sebanyak 10 indikator memiliki capaian yang baik, dengan tingkat capaian melebihi target. Kesepuluh indikator tersebut meliputi : (1) Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya; (2) Angka Melek Huruf; (3) Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya; (4) Angka Harapan Hidup; (5) Jumlah Wisatawa Nusantara; (6) Jumlah Wisatawan Mancanegara; (7) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; (8) Opini Pemeriksaan BPK; (9) Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan; (10) Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang terhadap RTRW Provinsi.

Sementara, terdapat 2 indikator yang tidak bisa dievaluasi tingkat ketercapaiannya, karena terjadinya perubahan sistem perhitungan dari BPS mulai tahun 2015. Kedua indikator tersebut meliputi Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendapatan Per Kapita.

Rata-Rata Lama Sekolah, dalam target RPJMD adalah untuk penduduk usia di atas 15 tahun. Sementara mulai tahun 2015, BPS menghitung jumlah tahun belajar untuk penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk mengulang).

Demikian juga dengan indikator pendapatan per kapita. Jika dilihat angkanya secara langsung, indikator pendapatan per kapita tercapai dengan sangat efektif, misalnya tahun 2016 targetnya hanya sebesar Rp 8.200.000, realisasinya mencapai Rp 23.560.000. Melihat angka ini, ada kesan pencapaian target mencapai hampir 300%. Namun bila ditelusuri lebih jauh, ternyata hal ini terjadi karena perubahan sistem penghitungan PDRB riil, baik dalam hal komponen maupun standar harga tahun dasar. Oleh karena itu, kedua indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan sepadan selama lima tahun terakhir.

Meskipun sebagian besar IKU dapat tercapai dengan baik, namun masih terdapat lima IKU yang pencapaiannya kurang optimal. Kelima IKU tersebut meliputi : (1) Indeks Ketimpangan Antar Wilayah; (2) Indeks Ketimpangan Pendapatan; (3) Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara; (4) Lama Tinggal Wisatawan Nusantara; dan (5) *Load Factor* Angkutan Perkotaan.

Dalam hal pemerataan, pada dasarnya peningkatan kesenjangan, baik Kesenjangan Antar Wilayah maupun Kesenjangan Pendapatan, bisa merupakan bagian dari dampak pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi. Seperti dihipotesiskan oleh Kuznets[1], suatu perekonomian yang mengalami pertumbuhan cepat, pada umumnya akan diikuti dengan kesenjangan yang tinggi terlebih dahulu dan selanjutnya, baru pertumbuhan dan pemerataan bisa berjalan seiring.

---

[1] Dalam Todaro, M.P. and Smith, S.C. (2014). *Economic Development*. 12th Edition. London: Pearson Education

Demikian juga dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat menjadikan tidak semua orang mampu mengaksesnya. Keberadaan teknologi, disamping meningkatkan efisiensi juga dapat meningkatkan kesenjangan. Oleh karena itu, masalah kesenjangan tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme pasar, melainkan perlunya keberpihakan terhadap prioritas wilayah dan keberpihakan terhadap golongan yang rentan melalui intervensi langsung untuk menanganinya. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan di masa datang.

Masalah kedua, terkait dengan **lama tinggal wisatawan**, terdapat beberapa hal yang ditengarai menjadikan lama tinggal wisatawan menjadi lebih cepat. Salah satunya adalah kemudahan akses menuju destinasi wisata. Karena mudahnya akses transportasi (baik transportasi darat maupun udara) menjadikan wisatawan tidak memerlukan banyak waktu untuk mengunjungi destinasi wisata di DIY. Meskipun demikian, pengembangan atraksi dan berbagai aktivitas wisata masih menjadi permasalahan kita bersama untuk menahan wisatawan lebih lama, dan meningkatkan belanja wisatawan, sehingga memberi pengaruh positif dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Untuk **penggunaan transportasi publik**, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati bersama, antara lain adalah perkembangan industri otomotif. Penggunaan kendaraan pribadi, baik kendaraan roda dua ataupun roda empat, memberikan kenyamanan dan kepraktisan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, menjadi sangat wajar jika masyarakat selalu berupaya memiliki kendaraan pribadi untuk operasional sehari-hari. Apalagi bila biaya operasional kendaraan pribadi lebih murah.

Dalam perkembangannya, kemajuan industri otomotif mampu menciptakan produk yang mampu dijangkau oleh masyarakat yang paling bawah sekalipun. Akibatnya, penggunaan transportasi publik menjadi kurang menarik. Namun demikian, penyediaan prasarana transportasi publik dirasakan masih sangat relevan dan menjadi mendesak, apabila dihadapkan fakta semakin tidak nyamannya suasana lalu lintas di Yogyakarta ketika musim libur panjang atau akhir pekan, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang memicu kemacetan dari perspektif teknis, sosial, budaya, hingga aspek ekonomis.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin sekalian yang saya hormati,

Selain IKU Pemda DIY, perlu juga disampaikan sejumlah capaian indikator lain yang dirasakan dapat menggambarkan sejumlah capaian kinerja, sebagai upaya untuk mewujudkan peri kehidupan dan tatanan sosial baru, sebagaimana visi misi yang sudah saya bacakan tadi.

Dalam struktur angkatan kerja di DIY menunjukkan bahwa angka **tingkat pengangguran terbuka** cenderung menurun sejak tahun 2012 hingga 2016. Lebih lanjut, angka pengangguran terbuka di DIY memiliki capaian kecenderungan yang lebih baik daripada capaian nasional. Hingga 2016, capaian angka pengangguran terbuka di DIY mencapai 2,72%, sementara capaian nasional menunjukkan sebesar 5,49%. Fakta ini patut dipertahankan dengan tetap mendorong pembukaan lapangan kerja baru serta menghubungkan antara penawaran tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha.

Untuk **kondisi perekonomian DIY** pada 2013-2017, senantiasa menunjukkan angka yang cenderung tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan 5,21%. Meskipun sempat mengalami kontraksi laju pertumbuhan pada tahun 2013-2015, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 menunjukkan perbaikan. Fluktuasi perekonomian DIY tidak lepas dari pengaruh siklus perekonomian nasional. Meskipun sama-sama mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi, perekonomian DIY justru mampu tumbuh di atas rata-rata nasional pada periode 2013-2016. Ini menunjukkan bahwa sektor riil sangat menopang perekonomian wilayah, terutama dari sektor UMKM yang memiliki andil besar dalam stabilitas perekonomian dan menumbuhkan sektor pariwisata sebagai salah satu basis industri kreatif.

Sedangkan, potret **penduduk miskin** DIY tahun 2012-2016 menunjukkan kecenderungan semakin menurun. Penurunan itu menunjukkan bahwa upaya terpadu dalam mengentaskan kemiskinan sudah memberikan hasil, meskipun masih perlu dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa, dari sisi jumlah penduduk miskin, menunjukkan adanya peningkatan. Tercatat pada tahun 2016, terdapat 488.830 penduduk miskin di DIY. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat nasional, persentase penduduk miskin di DIY sebesar 13,1 %, masih di atas tingkat nasional yang capaiannya 10,7%. Fakta kemiskinan DIY menunjukkan bahwa problem ini masih memerlukan langkah efektif dalam menekan tingkat kemiskinan, yang secara wilayah memerlukan keberpihakan penanganan pada wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo.

Selain itu, perlu diwaspadai adanya fenomena urbanisasi yang mengakibatkan perpindahan kemiskinan dari perdesaan ke wilayah perkotaan Yogyakarta, sehingga diperlukan langkah antisipasi humanis sebagai sebuah rekayasa sosial-budaya untuk menekan kemiskinan melalui langkah-langkah penumbuhan ekonomi produktif yang kreatif.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin sekalian yang saya hormati,

Berikut akan Saya sampaikan gambaran pengelolaan keuangan daerah selama kurun lima tahun terakhir, sebagai berikut : dari sisi Pendapatan Daerah, realisasi pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami pertumbuhan, rata-rata sebesar 23,15%. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, rata-rata sebesar 50,29%, dengan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun.

Meskipun pendapatan yang bersumber dari pusat terhadap pembiayaan pembangunan di DIY masih cukup dominan, upaya inovatif untuk meningkatkan pendapatan daerah terus diupayakan. Sejumlah upaya itu adalah : penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai kondisi pasar yang diimbangi dengan perbaikan fasilitas pelayanan, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak maupun retribusi daerah, memberikan inisiasi pada SKPD agar mengoptimalkan barang milik daerah yang menjadi kewenangannya, mendorong kinerja BUMD, dan mendorong SKPD untuk melakukan optimalisasi pendapatan sesuai kewenangan.

Sedangkan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam kebijakan belanja daerah, DIY memprioritaskan pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain : belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada setiap tahunnya. Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar.

Selama kurun waktu 2013-2017, realisasi belanja rata-rata mencapai 89,78%. Secara besaran, realisasi belanja setiap tahunnya terus meningkat, dengan adanya tambahan belanja yang bersumber dari dana keistimewaan maupun penyesuaian regulasi. Realisasi belanja pada tahun 2013 mencapai Rp 2,50 Trilyun, senantiasa terus meningkat dengan target belanja hingga Rp 5,20 Trilyun pada tahun 2017.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin sekalian yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan juga capaian kinerja Anggaran Keistimewaan kurun waktu 2013-2017, yang dipergunakan untuk membiayai lima urusan, yakni : Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang.

Sejak tahun 2013-2017, kucuran Dana Keistimewaan dari Pemerintah cenderung meningkat. Alokasi anggaran pada 2014 naik cukup signifikan, yaitu sebesar 126,4% dibanding tahun sebelumnya (2013). Sedangkan anggaran dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2015 naik 4,5% dari anggaran tahun 2014 dan alokasi Anggaran 2016 sama dengan tahun 2015 sebesar Rp547,45 Milyar dan tahun 2017 meningkat 46,13% atau sebesar Rp800 Milyar.

Adapun realisasi fisik maupun keuangan untuk anggaran keistimewaan selama lima tahun terakhir, menunjukkan progres yang semakin baik. Realisasi fisik pada tahun 2013 mencapai 29,35 %, senantiasa terus mengalami peningkatan dalam hal realisasi fisik menjadi di atas 90 % selama tahun 2014-2016. Hal senada juga dapat dilihat pada realisasi serapan keuangan yang hanya mencapai 23% pada tahun 2013, mengalami kecenderungan meningkat hingga 97% pada tahun 2016. Peningkatan kualitas realisasi program kegiatan yang bersumber dari anggaran keistimewaan, dipengaruhi oleh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang semakin kualitatif.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Demikian pidato Penghantaran LKPJ AMJ Tahun 2012-2017, semoga hal-hal yang sudah saya sampaikan dapat memberikan gambaran umum tentang hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun pendalaman materi secara lebih detail dan teknis, kami akan menjelaskan melalui forum-forum pertemuan selanjutnya.

Pada kesempatan ini pula, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, beserta segenap pemangku kepentingan atas kerja sama dan partisipasinya dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2012-2017. Sejumlah sasaran pembangunan sudah memberikan beberapa *progress* yang seharusnya, tetapi masih ada beberapa problematika yang harus ditangani bersama secara lebih gumregah. Semoga sinergi di antara kita semua akan lebih meningkat lagi pada periode jangka menengah berikutnya. Kerja belum selesai.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X